



RENJA

RENCANA KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku merupakan dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yaitu menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Dinas dengan perencanaan dan penganggaran Tahunan Pemerintah Provinsi Maluku. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku secara substansial menjabarkan Visi, Misi Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku dan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Periode 2019 - 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019 - 2024.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Tahun Ketiga Periode Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022, untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2022.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Provinsi Maluku memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, dan Evaluasi Hasil RENJA Tahun 2020 serta masukan dalam Pelaksanaan Forum OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
3. Perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

Berdasarkan uraian di atas maka, penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2020 harus berdasarkan 7 (tujuh) prioritas daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dari 7 prioritas yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berada pada prioritas :

1. **PRIORITAS 2**, yaitu :

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan secara berkelanjutan, dengan program prioritas yaitu Perencanaan dan Pembangunan Industri. Sedangkan kegiatan priorotasnya adalah Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan sub kegiatan adalah :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana Industri.

2. PRIORITAS 3, yaitu :

Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Investasi dan Pariwisata, dengan program prioritas yaitu :

1. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Sedangkan kegiatan prioritsnya adalah Pengendalian harga, informasi ketersediaan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam sistim informasi perdagangan, dengan sub kegiatan adalah :
 - Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas Kabupaten/Kota.
2. Pengembangan Ekspor. Sedangkan kegiatan prioritasnya adalah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah :
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 - 2025;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024;

- 12) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku;
- 13) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD, Dinas dan Badan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022, sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memberikan arah untuk mencapai tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024, dan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun Ketiga Periode 2019 - 2024.

Dari **maksud** dan **tujuan** di atas, penyusunan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022

diharapkan dapat menjadi arah/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 dan sebagai instrument/alat ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Periode 2019 - 2024, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020, dan realisasi RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang mengacu pada laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.

Pada Tahun Anggaran 2020, ada beberapa kegiatan prioritas yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran akibat Penanganan Covid-19, antara lain :

- 1). Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Tenun Ikat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mendukung program prioritas Gubernur Maluku tentang OVOP (One Village One Product).
- 2). Kegiatan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Pendukung Klaster Industri yang meliputi bantuan sarana produksi Industri Kecil dan Menengah serta anggaran distribusi bantuan

peralatan kepada pengrajin IKM dan pedagang Tahun 2020 yang tersebar di Kabupaten/Kota untuk mendukung indikator kinerja pertumbuhan industri.

- 3). Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang meliputi bantuan benang dan zat pewarna Tenun Ikat, serta peralatan pengolahan hasil perikanan.
- 4). Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga dalam rangka perlindungan konsumen yang seharusnya dilaksanakan secara rutin/berkala pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota tetapi hanya dilaksanakan pada 2 (Dua) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara.
- 5). Kegiatan Rebranding Kemasan serta Diklat memasuki pasar ekspor yang direncanakan untuk 2 (Dua) IKM.
- 6) Kegiatan Rehabilitasi Laboratorium Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang yang direncanakan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena keterlambatan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Perubahan Tahun 2020 yang ditetapkan pada Tanggal 02 Desember 2020, sehingga yang terealisasi hanya belanja jasa perencanaan sedangkan anggaran fisik dan pengawasan diusulkan untuk ditampung pada anggaran Perubahan APBD Tahun 2021.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 dan capaian RENSTRA dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja pada tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun Berjalan/nya dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5x100%		16			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	3 07	Urusan Pilihan				8.978.858.181		8.083.764.725		663.489.844		1.298.084.238		2.371.568.825		-		2.410.340.952		7.612.078.780	100	94,2		15.824.386.211					
I.	3 07 3.07.01 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Jasa Layanan untuk memperlancar tugas-tugas perkantoran			1.385.931.523		1.998.574.025		357.987.722		405.557.759		520.044.384				-		1.945.987.636	100	97,4		3.331.919.159					
	3 07 3.07.01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai yang tersedia			2 Jenis	8.500.000	2 Jenis	8.850.000	2 Jenis	1.810.000	2 Jenis	2.080.000	2 Jenis	450.000	2 Jenis	4.455.000	2 Jenis	8.795.000	100	99,4		17.295.000			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah listrik, air dan telepon serta jaringan internet			5 Jenis	181.803.418	4 Jenis	190.200.000	4 Jenis	35.480.972	4 Jenis	37.631.659	4 Jenis	45.535.449	4 Jenis	39.022.136	4 Jenis	157.670.216	100	82,9		339.473.634			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga cleaning dan peralatan			9 Jenis/2 orang	70.544.000	9 Jenis/2 org	92.919.450	9 Jenis/2 orang	13.895.300	9 Jenis/2 orang	25.777.200	9 Jenis/2 orang	22.677.700	9 Jenis/2 orang	28.041.500	9 Jenis/2 orang	90.391.700	100	97,3		160.935.700			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah peralatan yang diperbaiki			5 Jenis	19.938.000	5 Jenis	20.000.000	5 Jenis	3.200.000	5 Jenis	3.600.000	5 Jenis	5.350.000	5 Jenis	7.850.000	5 Jenis	20.000.000	100	100		39.938.000			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah atk yang tersedia			10 Jenis	129.984.540	7 Jenis	125.000.000	7 Jenis	24.578.000	7 Jenis	13.850.000	7 Jenis	24.367.200	9 Jenis	62.110.000	9 Jenis	124.905.200	100	99,9		254.889.740			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak, penggandaan yang tersedia			2 Jenis	72.244.200	3 Jenis	83.900.000	3 Jenis	11.174.650	3 Jenis	16.490.000	3 Jenis	16.475.150	3 Jenis	38.390.200	3 Jenis	82.530.000	100	98,4		154.774.200			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik			7 Jenis	9.999.600	7 Jenis	15.000.000	7 Jenis	1.500.000	7 Jenis	4.366.000	7 Jenis	3.600.000	7 Jenis	5.490.000	7 Jenis	14.956.000	100	99,7		24.955.600			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			-	-	4 paket	270.500.000	-	-	-	-	2 paket	118.745.000	2 paket	150.000.000	4 paket	268.745.000	100	99,3		268.745.000			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan koran			3 Jenis	7.270.000	3 Jenis	9.000.000	3 Jenis	480.000	3 Jenis	1.412.000	3 Jenis	2.051.000	3 Jenis	1.195.000	3 Jenis	5.138.000	100	57,1		12.408.000			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Jumlah rapat dan tamu yang berkunjung			30 kali	69.853.865	45 Kali	68.050.000	6 kali	8.699.600	12 kali	17.676.900	10 kali	13.482.885	15 kali	27.612.935	45 kali	67.472.320	100	99,1		137.326.185			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah			11 Kali	187.836.900	9 Kali	189.100.000	4 Kali	62.071.400	-	-	1 Kali	19.200.000	4 Kali	101.950.000	9 Kali	183.221.400	100	96,9		371.058.300			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah supir dan tenaga administrasi			19 Orang	443.880.000	19 Orang	648.960.000	16 Orang	98.800.000	19 Orang	213.200.000	19 Orang	202.800.000	19 orang	130.416.000	19 orang	645.216.000	100	99,4		1.089.096.000			Disperindag Promal			
	3 07 3.07.01 01 20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			-	184.077.000	14 lokasi	277.094.575	5 lokasi	96.297.800	3 lokasi	69.474.000	3 lokasi	45.310.000	3 lokasi	65.865.000	14 lokasi	276.946.800	100	99,9		461.023.800			Disperindag Promal			
II.	3 07 3.07.01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran				528.745.143		640.112.000		12.412.622		17.640.379		299.645.601		203.683.652		633.131.854	100	98,9		1.062.127.397						

	3	07	3.07.01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung			3 jenis	83.320.000	12 buah	184.900.000	-	-	-	-	8 buah	128.992.050	4 buah	53.658.000	-	182.650.050	100	98,8	265.970.050		Disperindag Promal	
	3	07	3.07.01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeler			-	-	4 jenis	45.000.000	-	-	-	-	-	-	4 jenis	44.550.000	4 jenis	44.550.000	100	99	44.550.000		Disperindag Promal	
	3	07	3.07.01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Unit Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas			2 Buah	49.901.000	2 paket	67.500.000	-	-	-	-	1 paket	49.797.000	1 paket	17.500.000	2 paket	67.297.000	100	99,6	117.198.000		Disperindag Promal	
	3	07	3.07.01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor			1 unit	317.400.000	2 Unit	150.000.000	-	-	-	-	1 unit	99.800.000	1 unit	49.825.823	2 unit	149.625.823	100	99,7	467.025.823		Disperindag Promal	
	3	07	3.07.01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			12 buah	78.124.143	12 buah	92.712.000	12 buah	12.412.622	12 buah	17.640.379	12 Buah	21.056.551	12 Buah	38.149.829	12 buah	89.259.381	100	96,3	167.383.524		Disperindag Promal	
	3	07	3.07.01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	unit gedung kantor yang direhabilitasi			-	-	1 unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	99.749.600	1 unit	99.749.600	100	99,7	99.749.600		Disperindag Promal	
III.	3	07	3.07.01	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur				-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	100	100	25.000.000			
	3	07	3.07.01	03	05	Pengadaan Pakian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakian khusus			-	-	4 Pasang	25.000.000	-	-	-	-	4 Pasang	25.000.000	-	-	-	25.000.000	100	100	25.000.000		Disperindag Promal	
IV.	3	07	3.07.01	05	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur				77.687.600	-	34.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	34.320.000	-	34.320.000	100	98,3	112.007.600			
	3	07	3.07.01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi			100 orang	77.687.600	102 orang	34.920.000	-	-	-	-	-	-	102 orang	34.320.000	102 orang	34.320.000	100	98,3	112.007.600		Disperindag Promal	
V.	3	07	3.07.01	06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah				405.588.500	-	470.597.700	-	41.286.400	-	302.063.100	-	-	-	-	18.465.000	-	468.262.050	100	99,5	207.049.400			
	3	07	3.07.01	06	05	Forum SKPD Dinas Perindag Se-Maluku	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan			1 jenis	301.714.500	4 kegiatan	366.987.700	1 kegiatan	25.800.000	1 kegiatan	232.839.100	1 kegiatan	25.677.550	1 kegiatan	80.770.000	4 kegiatan	365.086.650	100	99,5	666.801.150		Disperindag Promal	
	3	07	3.07.01	06	06	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi			8 Laporan	103.874.000	6 Laporan	103.610.000	1 Laporan	15.486.400	4 Laporan	69.224.000	-	-	1 Laporan	18.465.000	-	103.175.400	100	99,6	207.049.400		Disperindag Promal	
VI.	3	07	3.07.01	15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase perlindungan konsumen terhadap barang beredar yang sesuai dengan ketentuan				225.044.000	-	131.300.000	-	39.085.400	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	67.340.000	-	124.425.400	100	94,8	349.469.400			
	3	07	3.07.01	15	06	Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasaran	Jumlah barang dan jasa serta terbit niaga yang diawasi			5000 produk	225.044.000	500 JENIS	131.300.000	150 produk	39.085.400	75 produk	9.000.000	75 produk	9.000.000	150 produk	67.340.000	450 produk	124.425.400	100	94,8	349.469.400		Disperindag Promal	
VII.	3	07	3.07.01	16	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Tingkat komoditi ekspor dan perluasan pasar ekspor				-	-	50.100.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	100	99,9	50.000.000				
	3	07	3.07.01	16	07	Pameran Luar Negeri	Terpromosinya Produk Unggulan Maluku pada event internasional			-	-	1 Produk	50.100.000	-	-	1 produk	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	100	99,9	50.000.000		Disperindag Promal	
VIII.	3	07	3.07.01	16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tingkat pertumbuhan unit usaha				4.686.793.415	-	2.588.106.000	-	82.910.700	-	18.550.000	-	1.318.357.840	-	1.145.769.400	-	2.565.587.940	100	99,1	7.252.381.355				
	3	07	3.07.01	16	07	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Kecil Menengah Pendukung Klaster Industri	Jumlah bantuan peralatan industri yang diberikan kepada masyarakat			286 paket	4.237.106.915	125 Paket	2.123.226.000	1 Paket	47.563.700	-	-	45 Paket	1.186.707.840	24 paket	870.989.400	56 paket	2.105.260.940	100	99,1	6.342.367.855		Disperindag Promal	

	3	07	3.07.01	16	08	Pengembangan IKM Unggulan Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan IKM unggulan			5 Kegiatan	449.686.500	4 Kegiatan	464.880.000	1 Kegiatan	35.347.000	1 Kegiatan	18.550.000	1 Keg	131.650.000	1 Keg	274.780.000	4 Kegiatan	460.327.000	100	99	910.013.500		Disperindag Promal								
IX.	3	07	3.07.01	17		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kapasitas produksi IKM				162.896.750		147.900.000		15.912.300		-		123.650.000		6.900.000		146.462.300	100	99	309.359.050										
	3	07	3.07.01	17	01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah bantuan peralatan produksi Industri yang diberikan kepada masyarakat			13 paket	162.896.750	3 Paket	147.900.000	1 Paket	15.912.300	-	-	1 Paket	123.650.000	1 Paket	6.900.000	1 Paket	146.462.300	100	99	309.359.050		Disperindag Promal								
X.	3	07	3.07.01	17		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor				277.015.750		129.135.000		57.166.400		-		18.866.000		52.019.000		128.051.400	100	99,2	405.067.150										
	3	07	3.07.01	17	10	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Jumlah kegiatan pengembangan ekspor			3 Kegiatan	277.015.750	3 kegiatan	129.135.000	1 Kegiatan	57.166.400	-	-	1 Keg	18.866.000	1 Kegiatan	52.019.000	3 Kegiatan	128.051.400	100	99,2	405.067.150		Disperindag Promal								
XI.	3	07	3.07.01	18		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				1.229.155.500		1.429.520.000		56.728.300		470.273.000		82.005.000		805.687.600	-	1.414.693.900	100	99	2.643.849.400										
	3	07	3.07.01	18	10	Pengembangan PDN Daerah	Jumlah kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri			8 Kegiatan	1.147.432.500	4 Kegiatan	1.395.420.000	1 Kegiatan	39.961.900	1 Kegiatan	470.273.000	1 Kegiatan	82.005.000	1 Kegiatan	788.587.600	1 Kegiatan	1.380.827.500	100	98,9	2.528.260.000		Disperindag Promal								
	3	07	3.07.01	18	15	Monitoring Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah monitoring distribusi berbahaya			4 Lokasi	81.723.000	2 Lokasi	34.100.000	1 lokasi	16.766.400	-	-	-	1 Lokasi	17.100.000	1 Lokasi	33.866.400	100	99,3	115.589.400		Disperindag Promal									
XII	3	07	3.07.01	20		Layanan Standarisasi dan Pengendalian Mutu Barang	Terbantuinya layanan pengujian mutu barang komoditi ekspor				-		438.500.000		-		-		-		76.156.300		76.156.300	100	17,4	76.156.300										
	3	07	3.07.01	20	01	Rehabilitasi Laboratorium Uji Mutu Barang	jumlah gedung kantor/lab yang direhabilitasi			-	-	1 unit	400.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	37.656.300	1 Unit	37.656.300	100	9,4	37.656.300		Disperindag Promal								
	3	07	3.07.01	20	02	Operasional Balai Pengujian Mutu Barang	jumlah anggaran operasional BPSMB yang			-	-	1unit	38.500.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	38.500.000	1 unit	38.500.000	100	100	38.500.000		Disperindag Promal								
J U M L A H													8.978.858.181		8.083.764.725		663.489.844		1.298.084.238		2.371.568.825		2.410.340.952		7.612.078.780	100	94,2	15.824.386.211								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Realisasi Pelaksanaan program/kegiatan harus berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Terjadi rasionalisasi anggaran menyebabkan rendahnya realisasi anggaran

Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : PPTK perlu memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan per bulan dan berkoordinasi dengan bendahara agar realisasi anggaran meningkat

Yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Khusus bagi PPK dan PPTK harus berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mempecepat proses pekerjaan

2.2. Analisis Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Periode 2019-2024.

Pada Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku capaian BAIK karena rata-rata capaiannya di atas 85%. Target yang tidak tercapai disebabkan oleh Penanganan Covid-19 pada Tahun 2020.

Target dan Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Target Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Perdagangan	Presentase cakupan bina kelompok pedagang	5%	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Presentase fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok	3,5 – 4%	
		Nilai Ekspor (Juta US\$)	13 US\$	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Presentase barang beredar sesuai	55 %	Perlindungan Konsumen dan Tertib

		dengan ketentuan		Niaga
2.	Meningkatnya Industri Daerah	Presentase cakupan bina kelompok pengrajin	45,26%	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan Industri	0,65%	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Pendukung Klaster Industri Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan Efesien	Presentase Program dan Kegiatan yang Tercapai	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Berdasarkan Tabel di atas capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang merupakan penjabaran sasaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran kinerja ini adalah :

- 1) Presentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang
- 2) Presentase fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok
- 3) Nilai Perkembangan Ekspor (Juta US\$)
- 4) Presentase barang beredar sesuai dengan ketentuan

Uraian capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Capaian kinerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel. 3 berikut ini :

Tabel 3. Capaian Sasaran Kinerja Perdagangan Dalam Negeri

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Persentase cakupan bina kelompok pedagang	13	18,3
2	Stabilnya harga bahan pokok	Persentase fluktuasi harga Bahan Pokok	3,5 – 4	18,3

Dalam rangka pencapaian kinerja Bidang Perdagangan Dalam negeri Tahun 2020, beberapa langkah upaya telah dilakukan baik dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stock barang pokok maupun upaya-upaya dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya IKM di Provinsi Maluku. Terkait dengan pertumbuhan/peningkatan usaha dari IKM Dinas Perindag dalam hal ini Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyediakan bantuan sarana perdagangan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dimana Tahun 2020 dari target 75 pedagang yang diberi bantuan atau sebesar 5 % ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 269 pedagang dari anggaran APBN dibagi total jumlah pedagang sebanyak 1500 dan 49 pedagang dari anggaran APBD sehingga total keseluruhan berjumlah 275 pedagang yang distimulus sehingga realisasi untuk cakupan bina kelompok pedagang sebesar 18,3 % yang melebihi target dan mengalami peningkatan sebesar 13,3 %.

2. Presentase Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok

Capaian kinerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 yang di sajikan pada Tabel 3 di atas Output yang diharapkan dari Arah dan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri adalah terciptanya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpadu, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting dapat terkendali dan sistem logistik yang memadai, serta menumbuhkembangkan kecintaan terhadap penggunaan produksi dalam negeri. Mengacu pada hal tersebut, eksistensi Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sebagai salah satu unsur birokrasi yang sangat bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam, menekan laju inflasi dan kesinambungan serta ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting serta stabilisasi harga di Provinsi Maluku.

Dalam pelaksanaan kerja bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, fokus pada upaya menjaga pemantapan sistim distribusi, pengendalian stock dan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Upaya-upaya itu dilakukan secara mandiri maupun terkoordinasi baik melalui rapat-rapat rutin seperti rapat koordinasi dengan TPID dan pihak-pihak terkait maupun melakukan pemantauan/monitoring bersama Tim Satgas Pangan Provinsi Maluku.

Seiring dengan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Provinsi Maluku sejak Maret 2020, aktivitas perdagangan di Maluku cenderung berjalan lancar. Harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Tahun 2020 secara umum terpantau stabil dengan rata-rata stock barang yang selalu tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 30 hari ke depan, kecuali beberapa komoditi seperti cabe, bawang, gula, telur yang cukup berfluktuasi namun secara perlahan mulai bergerak turun, meskipun pada akhir

semester kedua 2020 ini komoditi cabe terus bergerak naik dengan kenaikan yang sangat signifikan. Stabilitas harga di Maluku ini mengakibatkan Inflasi di Maluku (khusus untuk Kota Tual dan Kota Ambon) juga dapat terkendali. Inflasi Kota Ambon dan Kota Tual pada selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Inflasi di Provinsi Maluku

No.	Bulan	Kota Ambon	Kota Tual
1.	Januari	Inflasi sebesar 0,65%	Inflasi sebesar 0,68%
2.	Pebruasi	Inflasi sebesar 0,21%	deflasi sebesar 0,29%
3.	Maret	deflasi sebesar 0,71%	deflasi sebesar 0,55%
4.	April	deflasi sebesar 0,11%	Inflasi sebesar 0,31%
5.	Mei	Inflasi sebesar 0,21%	Inflasi sebesar 0,66%
6.	Juni	Inflasi sebesar 0,43%	Inflasi sebesar 1,07%
7.	Juli	Inflasi sebesar 0,06%	deflasi sebesar 0,34%
8.	Agustus	Inflasi sebesar 0,43%	deflasi sebesar 0,57%
9.	Sepember	deflasi sebesar 0,21%	Inflasi sebesar 0,21%
10.	Oktober	deflasi sebesar 0,59%	deflasi sebesar 0,09%
11.	November	deflasi sebesar 0,18%	Inflasi sebesar 1,15%
12.	Desember	Delasi sebesar 0,09%	Deflasi sebesar 0,16%

Tabel 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Maluku masih terkendali sesuai target inflasi di Maluku yakni 3% +/-1. Dari 90 Kota pencatatan inflasi Tahun 2020, secara peringkat Kota Ambon dan Kota Tual masih berada pada posisi yang cukup baik. Pada bulan Januari 2020 Kota Ambon menduduki peringkat 23, Kota Tual menduduki peringkat 18. bulan Pebruari, Kota Ambon menduduki peringkat 58, Kota Tual menduduki peringkat 85. Bulan Maret, Kota Ambon menduduki peringkat 84, Kota Tual menduduki peringkat 79.

Bulan April Kota Ambon menduduki peringkat 52, Kota Tual menduduki peringkat 10. Bulan Mei, Kota Ambon menduduki peringkat 38, Kota Tual menduduki peringkat 8. Bulan Juni, Kota Ambon menduduki peringkat 20, Kota Tual menduduki peringkat 4. Bulan Juli, Kota Ambon menduduki peringkat 25, Kota Tual menduduki peringkat 72. Bulan Agustus, kota Ambon menduduki peringkat 8, kota Tual menduduki peringkat 85. Bulan September, kota Ambon menduduki peringkat 69, kota Tual menduduki peringkat 9. Bulan Oktober, kota Ambon menduduki peringkat 85, kota Tual menduduki peringkat 75. Bulan November, kota Ambon menduduki peringkat 89, kota Tual menduduki peringkat 11. Bulan Desember, kota Ambon menduduki peringkat 88, kota Tual menduduki peringkat 89.

Diketahui bahwa kondisi pandemi Covid-19 telah berdampak pada aktivitas usaha tidak dapat berjalan dengan lancar, banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan (PHK/dirumahkan), daya beli masyarakat menurun, distribusi barang kebutuhan masyarakat juga cukup terganggu. Kondisi ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok cenderung meningkat sehingga ada sebagian masyarakat yang karena kepanikan dengan kondisi ini, cenderung lebih memilih aman dengan membeli barang kebutuhan pokok dalam jumlah banyak. Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Tim Monitoring Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Tim Satgas Pangan Maluku melakukan langkah-langkah penting, strategis dan cepat secara kontinyu guna mengantisipasi gejolak ataupun akibat yang ditimbulkan dari Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi khususnya kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang dalam kondisi saat ini menjadi sangat penting untuk dijaga. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring di berbagai fasilitas ekonomi seperti pasar (tradisional dan modern), pelabuhan laut/penyeberangan dan, distributor serta membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait lain termasuk kabupaten/kota dengan

maksud untuk memantau dan memastikan bahwa barang kebutuhan pokok selalu terdistribusi secara lancar, stok tersedia dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.

Selain pantauan terhadap barang kebutuhan pokok, dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pada masa pandemi Covid-19 ini, tim juga melakukan pantauan terhadap ketersediaan dan harga Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat kesehatan lain. Kondisi ekonomi yang dialami masyarakat sangat terasa pada semester pertama tahun 2020, namun memasuki semester kedua 2020, seiring dengan berbagai langkah kebijakan penting dan strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah Maluku cq. Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam rangka penanganan barang khususnya barang kebutuhan pokok baik yang dilakukan secara koordinasi maupun pemantauan di lapangan, distribusi kebutuhan pokok berjalan dengan lancar, barang tersedia secara cukup, harga stabil dan inflasi terkendali.

3. Pertumbuhan Nilai Ekspor Nonmigas (US\$)

Tahun 2020 dunia dibuka dengan mewabahnya Covid-19 penyakit yang disebabkan virus corona. Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertama pada Maret 2020. Pandemi Covid-19 mengakibatkan kelumpuhan ekonomi. Disamping itu terjadinya pandemi Covid-19, dampak terhadap investor dan sektor industri adalah timbulnya kebiasaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada yaitu *social distancing*, adanya kebiasaan baru tersebut tentu mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan daya saing produk yang dihasilkan. Kondisi ini tentu mempengaruhi kinerja ekspor suatu negara tetapi tidak berpengaruh pada Ekspor Maluku. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Nilai Ekspor Maluku Non Migas Tahun 2020 Januari - November adalah sebesar US\$ 45,12 Juta. Terjadi kenaikan sebesar 225,1% dari target sebesar US\$ 13 Juta dengan total ekspor sebanyak 491 kali. Peningkatan ekspor ini disebabkan adanya Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengeksport produk hasil perikanan dari pelabuhan Ekspor di Maluku. Langkah yang diambil dari Kebijakan tersebut adalah

telah dibentuk Tim Peningkatan Ekspor (TIPE) dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 263.a Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018 dengan menerapkan pelayanan dengan Sistem Aplikasi untuk pengurusan perizinan melalui Early Information Sistem (EIS), Non Stop Service 24 Jam 7 Hari (NSS 24/7) dan One Stop Service (OSS). Ekspor langsung dari Maluku sudah dilaksanakan sejak bulan Pebruari Tahun 2018.

Tabel 5. Capaian Kinerja Ekspor Non Migas

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	13	42,15

4. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Capaian kinerja Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 yang di sajikan pada Tabel 6. berikut ini :

Tabel 6. Capaian Kinerja Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Persentase Barang Beredar yang sesuai ketentuan	55	83,64

Presentasi barang beredar sesuai dengan ketentuan yakni :

- ✧ Target jumlah barang yang diawasi sebanyak 55 Produk dan 500 jenis barang beredar
- ✧ Jumlah barang yang diawasi sepanjang tahun 2020 yakni sebanyak 46 produk dan 500 jenis barang beredar

$$\frac{\text{Jumlah barang yang diawasi 2020}}{\text{Target capaian tahun 2020}} \times 100 \%$$

$$\frac{46}{55} \times 100 \% = 83,64 \%$$

Untuk mencapai indikator kinerja persentase barang beredar yang sesuai ketentuan, maka program/kegiatan pendukungnya adalah pengawasan barang beredar dan jasa yang direncanakan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, namun karena pandemi Covid-19 serta terjadi rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 maka kegiatan ini hanya dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Ambon. Karena keterbatasan anggaran maka sampai dengan akhir tahun 2020, capaian kinerja hanya mencapai 83,64%. ngawasan secara random terdiri atas 130 Jenis barang beredar.

5. Pengembangan Bidang Industri

Capaian kinerja Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2020 di sajikan pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Capaian Kinerja Bidang Industri

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45,26	58,32
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	0,65	0,93

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator pada tabel 7 pada program dari Kementerian Perindustrian, yakni Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka di daerah melalui Dana Dekonsentrasi Provinsi Maluku (APBN), kegiatan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Pendukung Kluster Industri, dan kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri melalui anggaran APBD tahun 2020.

Untuk cakupan bina kelompok pengrajin target 2020 sebesar 45,26%, capaian tahun 2020 sebesar 58,32% yang dihasilkan dari jumlah bantuan pemberdayaan kepada 425 Pengrajin IKM melalui anggaran pokok pikiran DPRD Provinsi Maluku dan dari Anggaran Refocusing Covid-19 kepada 167 pengrajin IKM. Total IKM yang berada di Provinsi Maluku sebanyak 1015 IKM sehingga realisasi cakupan bina kelompok pengrajin melalui bantuan peralatan meningkat sebesar 58,32%, yang mempengaruhi produktivitas dan daya saing Industri di Provinsi Maluku.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

2.3.1. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, maka perlu diatur Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Adapun uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- 1) Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 3) Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menemukan beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

- a. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yaitu pengembangan OVOP (One Village One Product) sejak tahun 2019 s/d 2020 tidak terealisasi karena terjadi rasionalisasi anggaran;
- b. Sebagian besar program/kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tidak dapat dilaksanakan karena alokasi anggaran setiap tahun mengalami penurunan.
- c. Khusus terkait perencanaan dan alokasi anggaran yang bersumber dari Pokok Pikiran DPRD perlu dilakukan penajaman khususnya bantuan kepada masyarakat perlu diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku periode 2019 - 2024, sehingga target-target capaian dalam RENSTRA dapat dicapai.
- d. Terlambatnya penetapan PERDA Anggaran Perubahan Tahun 2020 yang mengakibatkan tidak terealisasinya kegiatan Rehabilitasi Laboratorium Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, dan telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan untuk ditampung dalam anggaran APBD Perubahan Tahun 2021.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Secara umum, tantangan dan peluang pada sektor industri dan perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Sektor Industri

a) Tantangan :

- ✓ Pentingnya penggunaan teknologi yang tepat sasaran khususnya bagi IKM Maluku sehingga diharapkan dapat menekan harga produksi produk, peningkatan kualitas produk, serta memberikan efektivitas produksi.
- ✓ Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM terutama pelaku IKM agar dapat memanfaatkan peluang usaha pada era penggunaan teknologi informasi yang berkembang saat ini sehingga dapat berdaya saing dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu perlu adanya pendampingan bagi IKM agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi yang sudah berkembang setiap saat.
- ✓ Penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan investasi terutama pada sektor industri di Maluku.
- ✓ Minimnya infrastruktur pendukung di Maluku merupakan salah satu penghambat dalam peningkatan investasi saat ini. Tanpa adanya infrastruktur pendukung, permasalahan efisiensi produksi akan selalu menjadi masalah untuk calon investor yang akan berinvestasi di Maluku.
- ✓ Industri yang ramah lingkungan yang berkelanjutan di era Industri 4.0

b) Peluang :

- ◆ Sebagai langkah dalam penyiapan infrastruktur dasar serta kemudahan berinvestasi, Pemerintah Daerah Maluku juga gencar mendorong rencana pembangunan perwilayahan industri baik kawasan industri maupun sentra IKM agar dapat

segera terealisasi. Diharapkan dengan dibangunnya kawasan industri di Maluku akan menarik investor yang ingin berinvestasi di Maluku dengan menawarkan kemudahan berinvestasi dalam perwilayahan industri.

- ◆ Perkembangan era Industri 4.0 yang berkembang pesat selain menjadi tantangan juga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dalam membuka pangsa pasar baru baik dalam maupun luar negeri.

➤ Sektor Perdagangan

a) Tantangan :

- ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk dalam negeri sebagai langkah pengembangan ekonomi lokal dalam rangka mencegah maraknya penggunaan produk luar negeri. Hal tersebut berlaku pada daerah perbatasan dimana dibutuhkan kebijakan khusus agar produk dalam negeri dapat terjangkau.
- ✓ Perluasan pangsa pasar khususnya produk Maluku sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi dan ekspor Maluku. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam memberikan akses pasar yang sejalan dengan peningkatan kualitas produk ekspor.
- ✓ Pola pikir eksportir yang masih menginginkan ekspor dari luar Maluku.
- ✓ Biaya Logistik di Maluku masih cukup tinggi.
- ✓ Komoditi ekspor Maluku masih berorientasi pada komoditi perikanan, perkebunan, belum menyetuh pada komoditi yang lain seperti industri kreatif, kehutanan, perikanan dan lain-lain sehingga lambat dalam peningkatan ekspor.
- ✓ Meningkatnya kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan

b) Peluang :

- ◆ Pesatnya pertumbuhan retail-retail modern baik yang berskala besar maupun kecil di Provinsi Maluku memberi ruang atau akses pasar bagi pengrajin industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menciptakan produk terbaru yang berkualitas dan berdaya saing di pasar yang tentunya memenuhi ketentuan atau persyaratan dari suatu produk yang dihasilkan.
- ◆ Perkembangan era industri 4.0 yang berkembang pesat selain menjadi tantangan juga merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan. Kemudahan bertransaksi serta hilangnya batasan wilayah menjadi peluang yang harus dimanfaatkan dalam membuka pangsa pasar baru baik dalam maupun luar negeri.
- ◆ Memasuki era teknologi industri 4.0 maka tantangan yang dihadapi di atas sekaligus merupakan peluang mengingat sistem komunikasi lebih ditekankan pada teknologi berbasis digital sehingga permasalahan rendahnya kesadaran dan pemahaman konsumen dan tertib niaga dapat di atasi dengan komunikasi dan edukasi berbasis teknologi digital.

2.3.5. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program Kegiatan Prioritas Tahun 2021

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustriann dan Perdagangan Provinsi Maluku menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan ekspor, pertumbuhan industri, peningkatan cakupan bina pedagang, peningkatan cakupan bina pengrajin, kontribusi sektor industri terhadap PDB, stabilitas harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting, serta perlindungan terhadap konsumen. Langkah-langkah strategis yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku adalah :

- a. Peningkatan ekspor langsung, Optimalisasi Pelayanan Ekspor melalui Non Stop Service Twenty For Seven (NSS 247) yaitu pelayanan

eksportir dapat melaksanakan ekspor selama dua puluh empat jam dalam seminggu.

- b. Monitoring dan Evaluasi Harga dan Bapok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting, dilibatkannya satgas pangan dalam rangka pengamanan stock dan pemantauan harga.
- c. Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Perindustrian, dan cakupan bina kelompok pedagang melalui bantuan peralatan perdagangan maupun industri dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui bantuan peralatan.
- d. Terlindunginya konsumen, dilaksanakan pengawasan barang beredar secara rutin/berkala
- e. Peningkatan Pendapatan melalui UPTD Balai Sertifikasi Pengujian, Sertifikasi Mutu Barang
- f. Optimalisasi pemanfaatan pasar ole-ole sebagai sumber pendapatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil dan Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil makmur.

Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020 - 2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk menghindari kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Target RPJMN Tahun 2020-2024 menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal tahun 2020. Oleh sebab itu untuk tahun 2022 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4-6 % sehingga tahun 2022 jadi titik kunci ekonomi Indonesia melakukan akselerasi pasca Covid-19 yang bersumber dari investasi, ekspor, dan

industri pengolahan. Ketiga sumber ini diyakini membaik seiring dengan pemulihan ekonomi global.

Tema RKP Tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Topik pemulihan ekonomi menunjukkan peran pemerintah masih dibutuhkan untuk akselerasi proses pemulihan, baik masyarakat maupun dunia usaha. Sementara tema kedua menunjukkan kebijakan 2022 diarahkan untuk melakukan reformasi struktural yang selama ini tertinggal tujuannya agar daya saing Indonesia dapat meningkat di tengah persaingan global.

Tema RKP Tahun 2022 adalah memantapkan pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang inklusif. Prioritas RKP tahun 2022 adalah :

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku

Dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Tujuan dan Sasaran RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku Tahun 2022 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan yaitu misi 1 “Mewujudkan Birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani, dan misi 3 “ Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”.

Tema RKPD Tahun 2022 adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan 7 Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang terdiri dari :

- a) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- b) Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan
- c) Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata
- d) Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau

- e) Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia Maluku yang unggul
- f) Pemantapan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau secara merata dan berkualitas
- g) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mutu layanan publik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada tahun 2022 sebanyak 6 (enam) program sesuai dengan PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 yaitu (1) program penunjang urusan pemerintahan daerah, (2) program perizinan dan pendaftaran perusahaan, (3) program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting, (4) program pengembangan ekspor, (5) program standarisasi dan perlindungan konsumen, (6) program perencanaan dan pembangunan industri.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan, program perizinan dan pendaftaran perusahaan, serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan penunjang bidang perdagangan dalam negeri, program pengembangan ekspor merupakan program yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen berfokus pada kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen, dan program perencanaan dan pembangunan industri berfokus pada peningkatan cakupan bina kelompok pengrajin serta pertumbuhan industri.

Rencana Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI MALUKU**

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa			
1						3	4	5	6	7	8	9	10
3						URUSAN PILIHAN						14.359.917.151	15.077.913.009
3	31					Perindustrian						14.359.917.151	15.077.913.009
3	31	3	31	00	01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						14.359.917.151	15.077.913.009
3	30					Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						8.679.690.151	9.113.674.659
II.						Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik						4.175.048.151	4.383.800.559
3	30	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi, kepegawaian dan umum, serta keuangan dan aset					4.175.048.151	4.383.800.559
3	30	01	1.01			Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja					996.050.500	1.045.853.025
3	30	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun serta forum koordinasi	Provinsi			5 Dok	550.000.000	577.500.000

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa				
3	30	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dalam daerah, serta penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11 Kab/Kota			7 Laporan	288.634.500	303.066.225	
3	30	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	7 Kab/Kota			1 Lap	157.416.000	165.286.800	
3	30	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kapasitas ASN					211.039.873	221.591.867	
3	30	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Jakarta, Bandung			8 orang	116.567.000	122.395.350	
3	30	01	1.05	10		Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	Provinsi			100 orang	94.472.873	99.196.517	
3	30	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat jasa layanan untuk memperlancar tugas-tugas					730.884.778	767.429.017	
3	30	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Kantor	Provinsi			5 jns	22.035.778	23.137.567	
3	30	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Bahan pembersih	Provinsi			15 jns	225.000.000	236.250.000	
3	30	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah buku, Laporan dan Dukumen yang dicetak atau digandakan	Provinsi			5 jns	95.918.000	100.713.900	
3	30	01	1.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran, Buku dan Peraturan-undangan	Provinsi			3 Jenis	9.923.000	10.419.150	
3	30	01	1.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Rapat dan menjamu Tamu	Provinsi			2 jns	89.208.000	93.668.400	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa				
3	30	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Luar Daerah			13 kali	288.800.000	303.240.000	
3	30	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan perangkat daerah					409.475.000	429.948.750	
3	30	01	1.07	21		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2	Provinsi			3 Unit	850.000.000	892.500.000	
3	30	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Laptop, PC dan AC Kantor	Provinsi			15 Unit	209.475.000	219.948.750	
3	30	01	1.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit pengandaan pagar kantor BPSMB	Provinsi			1 unit	200.000.000	210.000.000	
3	30	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat jasa penunjang urusan perangkat daerah					1.327.123.000	1.393.479.150	
3	30	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai	Provinsi			2 Jenis	13.065.000	13.718.250	
3	30	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Listrik dan Air yang terbayarkan	Provinsi			5 jns	384.552.000	403.779.600	
3	30	01	1.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan Kantor	Provinsi			7 jns	28.004.000	29.404.200	
3	30	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi, supir, Jaga malam dan cleaning service	Provinsi			22 orang	901.502.000	946.577.100	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa				
3	30	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah					500.475.000	525.498.750	
3	30	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi			12 Buah	180.475.000	189.498.750	
3	30	01	1.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Toilet dan ruang rapat dinas	Provinsi			2 Unit	200.000.000	210.000.000	
3	30	01	1.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit pemeliharaan rumah jabatan	Provinsi			1 unit	70.000.000	73.500.000	
3	30	01	1.09	12		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	sertifikat tanah aset dinas	Provinsi			6 Buah	50.000.000	52.500.000	
VI.						Peningkatan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata					4.504.642.000	4.729.874.100		
3	30	02				Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan dan pendaftaran Perusahaan Bahan Berbahaya					104.829.000	110.070.450	

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa				
3	30	02	1.03			Pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya, pengecer terdaftar	Tingkat pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar					104.829.000	110.070.450	
3	30	02	1.03	02		Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya	Malra, Bursel, SBT, KKT			2 Jenis	104.829.000	110.070.450	
3	30	04				Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat kestabilan harga dan stok					1.060.054.000	1.113.056.700	
3	30	04	1.02			Pengendalian harga informasi, ketersediaan stok Bapok dan Bapokting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota yang terintegrasi dalam informasi perdagangan	Stabilisasi Harga dan Stok Bapok dan Bapokting					1.060.054.000	1.034.306.700	
3	30	04	1.02	02		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah pelaksanaan operasi pasar dan koordinasi dalam rangka stabilisasi harga menjelang HBKN, Pasar Murah dan sarana perdagangan	Provinsi, Jawa Timur, Makassar, Jakarta, SBB, SBT, Malra, Aru, Ambon			5 Jenis	985.054.000	1.034.306.700	
						Pasar Murah				4 kali	875.000.000	918.750.000		
						Pemantauan stok bahan pokok dan barang penting di distributor				48 kali	10.000.000	10.500.000		
						Monitoring Harga Bahan Pokok dan Barang penting di Distributor				25 kali	50.000.000	52.500.000		
						Asistensi kelancaran distribusi bapok dan monitoring tol laut				5 lok	50.054.000	52.556.700		

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa				
3	30	04	1.03			Pengawasan Pupuk dan pestisida tingkat provinsi dalam melaksanakan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya	Jumlah pengawasan pupuk	Provinsi Maluku				75.000.000	78.750.000	
3	30	04	1.03	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan pestisida	Jumlah pengawasan pupuk	Provinsi Maluku				75.000.000	78.750.000	
3	30	05				Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Komoditi Ekspor dan Perluasan Pasar Ekspor					2.418.367.000	2.539.285.350	
3	30	05	1.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota						2.418.367.000	2.539.285.350	
3	30	05	1.01	01		Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pameran dagang	Luar Daerah, Luar Negeri				1.363.825.000	1.432.016.250	
						Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang	Luar Daerah		1 kegiatan		363.825.000	382.016.250	
						Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pameran dagang	Luar Negeri		1 kegiatan		1.000.000.000	1.050.000.000	
3	30	05	1.01	05		Pembinaan Pelaku Ekspor						1.054.542.000	1.107.269.100	
						Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Evaluasi Peningkatan Ekspor	Jumlah Rapat	Provinsi, Luar Daerah			2 Kegiatan	81.365.000	85.433.250	

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
							LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
							Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa				
					FGD Permasalahan Ekspor dan Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Langsung	Jumlah Rapat	Provinsi				5 kali	36.750.000	38.587.500
					Workshop Kebijakan Ekspor	Jumlah workshop	Provinsi				2 Kab/Kota	105.000.000	110.250.000
					Koordinasi dan Konsultasi Ekspor	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Provinsi				2 kali	120.000.000	126.000.000
					Bimtek Pasar Ekspor	Jumlah bimtek	Luar Daerah				2 orang	25.000.000	26.250.000
					Rebranding IKM	Jumlah produk	Provinsi, Luar Daerah				2 IKM	108.927.000	114.373.350
					Workshop pengembangan dan promosi produk ekspor	Jumlah workshop	Provinsi				3 kali	577.500.000	606.375.000
3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan Konsumen terhadap Barang Beredar dan						921.392.000	967.461.600
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Konsumen terhadap barang yang beredar dan tertib niaga sesuai ketentuan						694.943.000	729.690.150
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan dan penyidikan serta Rakornas Perlindungan Konsumen	Ambon, Malteng, SBT Luar Daerah				2 Kegiatan	468.494.000	491.918.700
					Workshop pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah workshop	3 Kab/Kota				1 kegiatan	105.000.000	110.250.000
					Pembentukan dan Pendampingan BPSK	Jumlah pembentukan dan pendampingan	3 Kab/Kota				1 kegiatan	89.250.000	93.712.500

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa			
						Pendampingan LPKSM	Jumlah pendampingan LPKSM	1 Lokasi			1 kegiatan	42.000.000	44.100.000
						Koordinasi dan Konsultasi serta Harkonas	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Provinsi, Luar Daerah			2 kegiatan	142.994.000	150.143.700
						Pemantauan Barang Impor Ber SNI Wajib	Jumlah pemantauan				50 merek/type	89.250.000	93.712.500
3	30	06	1.03			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengawasan barang beredar/jasa					226.449.000	237.771.450
3	30	06	1.03	01		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen						226.449.000	237.771.450
						Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar	Jumlah pengawasan	11 Kab/Kota			1 kegiatan	97.626.000	102.507.300
						Pengawasan dan Penyidikan	Jumlah pengawasan dan penyidikan	4 Kab/Kota			1 kegiatan	60.307.000	63.322.350
						Pengenalan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen Berbasis Anroid	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang disosialisasi	2 Kab/Kota			1 kegiatan	68.516.000	71.941.800
3	30					Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						5.680.227.000	5.964.238.350
I.						Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran						5.680.227.000	5.964.238.350
3	31	02				Perencanaan dan Pengembangan Industri	Pengembangan Perencanaan dan Pengembangan Industri					5.680.227.000	5.964.238.350

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa			
3	31	02	1.01			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pengembangan, pemberdayaan industri dan masyarakat				5.680.227.000	7.964.004.300	
3	31	02	1.01	01		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi					150.000.000	157.500.000	
						Pembahasan RPIP	Jumlah pembahasan	Provinsi			1 kegiatan	100.000.000	105.000.000
						Sosialisasi RPIP	Peserta sosialisasi	3 Kab/Kota			1 kegiatan	50.000.000	52.500.000
3	31	02	1.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri					579.539.000	608.515.950	
						Fasilitasi Proses Produksi Tenun Ikat	Jumlah pengrajin tenun yang difasilitasi				15 Pengrajin	150.381.000	157.900.050
						Bantuan Benang dan Zat Pewarna Tenun Ikat	Jumlah Bantuan Peralatan dan Zat Pewarna	Kab. KKT			5 ikm	150.000.000	157.500.000
						Bantuan Ketel Minyak Atsiri	Jumlah Bantuan ketel				3 unit	100.658.000	105.690.900
						Worshop Teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah industri	jumlah sosialisasi teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah industri	3 Kab/Kota			1 kegiatan	89.250.000	93.712.500
						Sosialisasi Efisiensi Produksi Berbasis Teknologi bersih dan hemat energi	jumlah sosialisasi	3 Kab/Kota			1 kegiatan	89.250.000	93.712.500
3	31	02	1.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Unit outlet bandara pattimura, dan Pameran Dekrans	Ambon, SBB, Malteng, SBT, Buru, Bursel, Aru, MBD, KKT, Tual				575.000.000	603.750.000

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021					PRAKIRAAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	
								LOKASI			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
								Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa				
						Pengembangan Outlet Bandara Pattimura	Unit outlet yang dikembangkan	Provinsi			1 Unit	125.000.000	131.250.000	
						Pameran Dekranas dan Inacraft	Jumlah Pameran	Luar Daerah			2 kegiatan	450.000.000	472.500.000	
3	31	02	1.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						650.000.000	682.500.000	
						Pembangunan Rumah Produksi Tenun Ikat	Jumlah rumah produksi yang dibangun	KKT			1 Unit	650.000.000	682.500.000	
3	31	02	1.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						3.725.688.000	3.859.472.400	
						Bantuan Peralatan Produksi Industri	Jumlah bantuan peralatan	11 Kab/Kota			1 kegiatan	3.425.688.000	3.596.972.400	
						Bantuan Kemasan	Jumlah bantuan kemasan				15 unit usaha	250.000.000	262.500.000	
						Fasilitasi Pendaftaran HaKI, PIRT, Halal, IG	Jumlah IKM yang difasilitasi				1 PRODUK	50.000.000	52.500.000	
											JUMLAH	14.359.917.151		

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran sesuai RENSTRA Dinas Perindustriann dan Perdagangan Provinsi Maluku periode 2019-2024 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tahun 2022, sebagai upaya mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2019 - 2024.

Komitmen dan dukungan ASN Dinas Perindustriann dan Perdagangan Provinsi Maluku sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun dalam RENJA Dinas Perindustriann dan Perdagangan Provinsi Maluku tahun 2022.

Ambon, 12 April 2021

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku,



ELVIS PATTISELANNO, SE, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19620114 198803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan A.M Sangadji No.66 Ambon, 97126 Telp/Fax. (0911) 353219/352666
Website : www.disperindag.malukuprov.go.id, Email : disperindagpromal@gmail.com